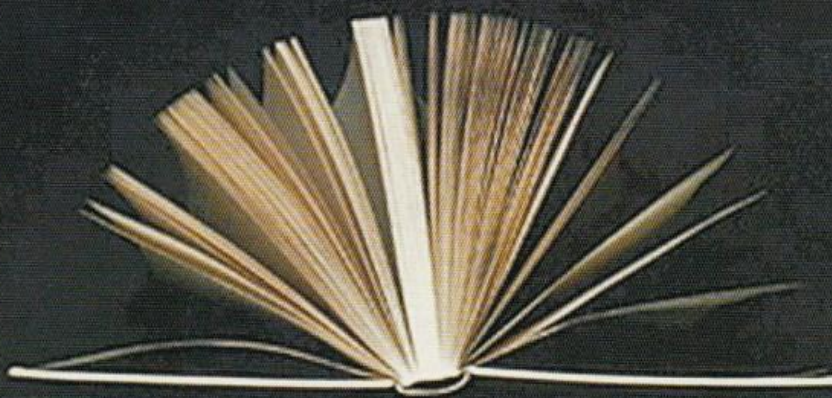


HANS KELSEN

TEORI HUKUM MURNI

DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF



DAFTAR ISI

I. HUKUM DAN ALAM ~ 1

1. TEORI "MURNI" ~ 1
2. PERBUATAN DAN MAKNA HUKUMNYA ~ 2
3. MAKNA SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF SUATU PERBUATAN: PENAFSIRAN-
DIRINYA ~ 3
4. NORMA ~ 4
 - a) Norma sebagai Skema Penafsiran ~ 4
 - b) Norma dan Penciptaan Norma ~ 5
 - c) Keabsahan dan Lingkup Keabsahan Norma ~ 11
 - d) Peraturan Positif dan Negatif: Memerintahkan, Mewenangkan,
Mengizinkan ~ 17
 - e) Norma dan Nilai ~ 19
5. TATANAN SOSIAL ~ 27
 - a) Tatanan Sosial yang Menetapkan Sanksi ~ 27
 - b) Adakah Tatanan Sosial tanpa Sanksi? ~ 30
 - c) Sanksi Transendental dan Imanen secara Sosial ~ 31
6. TATANAN HUKUM ~ 34
 - a) Hukum: Sebuah Tata Perilaku Manusia ~ 34
 - b) Hukum: Sebuah Tatanan Pemaksa ~ 37
 - Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai
sanksi ~ 39
 - Monopoli pemaksaan dari komunitas hukum ~ 40
 - Tatanan hukum dan keamanan kolektif ~ 42
 - Tindakan paksa selain dari sanksi ~ 45
 - Tingkat minimum kebebasan ~ 47
 - c) Hukum Sebagai Tatanan Pemaksa Normatif; Komunitas Hukum
dan Geng Perampok ~ 49
 - d) Kewajiban Hukum tanpa Sanksi? ~ 56
 - e) Norma Hukum Terikat ~ 61

II. HUKUM DAN MORAL ~ 67

7. NORMA MORAL SEBAGAI NORMA SOSIAL ~ 67
8. MORAL SEBAGAI PENGATUR PERILAKU INTERNAL ~ 68
9. MORAL, SEBUAH TATANAN POSITIF TANPA-PAKSAAN ~ 70
10. HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI MORAL ~ 71

11. RELATIVITAS NILAI MORAL ~ 72
12. PEMISAHAN ANTARA TATANAN HUKUM DAN MORAL ~ 75
13. PEMBENARAN HUKUM MELALUI MORAL ~ 77

III. HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN ~ 80

14. NORMA HUKUM SEBAGAI OBYEK ILMU HUKUM ~ 80
15. TEORI HUKUM STATIS DAN DINAMIS ~ 80
16. NORMA HUKUM DAN ATURAN HUKUM ~ 81
17. ILMU SEBAB-AKIBAT DAN ILMU NORMA ~ 85
18. KAUSALITAS DAN IMPUTASI ~ 87
HUKUM ALAM DAN HUKUM PERUNDANGAN ~ 87
19. PRINSIP IMPUTASI DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT PRIMITIF ~ 93
20. ASAL-MUASAL PRINSIP KAUSALITAS DALAM PRINSIP RETRIBUSI ~ 96
21. ILMU SOSIAL KAUSAL DAN NORMATIF ~ 97
22. PERBEDAAN ANTARA PRINSIP KAUSALITAS DAN IMPUTASI ~ 102
23. PERSOALAN KEBEBASAN KEHENDAK ~ 104
24. FAKTA-FAKTA YANG SELAIN DARI PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MUATAN
NORMA SOSIAL ~ 113
25. NORMA KATEGORIS ~ 114
26. PENOLAKAN ATAS YANG SEHARUSNYA; HUKUM SEBAGAI IDEOLOGI ~ 115

IV. ASPEK STATIS HUKUM ~ 123

27. SANKSI ~ 123
 - a) Sanksi Hukum Nasional dan Internasional ~ 123
 - b) Pelanggaran (Kesalahan) bukanlah Negasi, melainkan Kondisi Hukum ~ 126
28. KEWAJIBAN HUKUM ~ 131
 - a) Kewajiban dan Sanksi Hukum ~ 131
 - b) Kewajiban dan "Keharusan" Hukum ~ 134
 - c) Pertanggungjawaban ~ 136
 - d) Pertanggungjawaban Individual dan Kolektif ~ 138
 - e) Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan dan Pertanggungjawaban Absolut ~ 139
 - f) Kewajiban Mengganti Kerugian atau Perbaikan ~ 140
 - g) Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut ~ 142
- 29) HUKUM DALAM PENGERTIAN SUBYEKTIF: HAK DAN OTORISASI ~ 143
 - a) Hak dan Kewajiban ~ 143
 - b) Jus ad rem dan Jus in personam ~ 148
 - c) "Hak" sebagai Kepentingan yang Dilindungi Hukum ~ 151
 - d) "Hak" sebagai Kekuatan Hukum ~ 152
 - e) "Hak" sebagai Izin Positif ~ 156

- f) Hak Politik ~ 157
- 30. KAPASITAS UNTUK BERTINDAK; KOMPETENSI: KONSEP "ORGAN" ~ 165
 - a) Kapasitas untuk Bertindak (*Handlungsfähigkeit*) ~ 165
 - b) Kompetensi ~ 168
 - c) Konsep "Organ" ~ 170
- 31. REPRESENTASI KAPASITAS HUKUM (*RECHTSFÄHIGKEIT*) ~ 179
- 32. RELASI HUKUM ~ 185
- 33. SUBYEK HUKUM; ORANG ~ 190
 - a) Subyek Hukum ~ 190
 - b) Orang (*Person*) secara Fisik ~ 193
 - c) Badan Hukum ~ 196
 - d) Badan Hukum sebagai Subyek yang Bertindak ~ 198
 - e) Badan Hukum sebagai Subyek dari Kewajiban dan Hak ~ 200
 - Kewajiban bagi badan hukum ~ 202
 - Pertanggungjawaban badan hukum ~ 208
 - Hak badan hukum ~ 210
 - f) Badan Hukum sebagai Konsep Pelengkap Ilmu Hukum ~ 213
 - g) Penghapusan Dualisme Hak dan Kewajiban ~ 214

V. ASPEK DINAMIS HUKUM ~ 216

- 34. ALASAN KEABSAHAN TATANAN NORMA: NORMA DASAR ~ 216
 - a) Makna Pencarian Alasan Keabsahan ~ 216
 - b) Prinsip Statis dan Dinamis ~ 218
 - c) Alasan bagi Keabsahan Tatahan Hukum ~ 222
 - d) Norma Dasar sebagai Pengandaian Transenden-logis ~ 225
 - e) Kesatuan Logis dari Tatahan Hukum; Konflik Norma ~ 229
 - f) Legitimasi dan Keefektifan ~ 230
 - g) Keabsahan dan Keefektifan ~ 233
 - h) Norma Dasar Hukum Internasional ~ 236
 - i) Teori Norma Dasar dan Teori Hukum Alam ~ 239
 - j) Norma Dasar Hukum Alam ~ 242
- 35. STRUKTUR HIERARKIS TATANAN HUKUM ~ 243
 - a) Konstitusi ~ 243
 - b) Legislasi dan Tradisi ~ 247
 - c) Undang-undang dan Peraturan ~ 252
 - d) Hukum Materiil dan Formil ~ 253
 - e) Yang Dinamakan Sumber Hukum ~ 256
 - f) Penciptaan, Penerapan, dan Ketaatan terhadap Hukum ~ 257
 - g) Yurisdiksi ~ 260
 - Karakter konstitusi dari keputusan hukum ~ 260
 - Hubungan antara keputusan pengadilan dan norma hukum umum yang harus diterapkan ~ 266

- Celah-celah dalam hukum ~ 270
- Penciptaan norma hukum umum oleh pengadilan; fleksibilitas hukum dan kepastian hukum ~ 275
- h) Transaksi Hukum ~ 282
 - Transaksi hukum sebagai fakta pencipta hukum ~ 282
 - Kontrak ~ 284
- i) Administrasi ~ 289
- j) Konflik antara Norma dari Beragam Tingkatan ~ 294
 - Keputusan pengadilan yang "tidak absah" ~ 294
 - Undang-undang yang "inkonstitusional" ~ 299
- k) Kebatalan (Nullity) dan Keterbatalan (Annulability) ~ 305

VI. HUKUM DAN NEGARA ~ 308

- 36. PENCiptaan HUKUM DAN BENTUK PEMERINTAHAN ~ 308
- 37. HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIBADI ~ 309
- 38. KARAKTER IDEOLOGIS DUALISME HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT ~ 311
- 39. DUALISME TRADISIONAL ANTARA NEGARA DAN HUKUM ~ 314
- 40. FUNGSI IDEOLOGIS DUALISME NEGARA DAN HUKUM ~ 315
- 41. KEIDENTIKAN NEGARA DAN HUKUM ~ 316
 - a) Negara sebagai Tatanan Hukum ~ 316
 - b) Negara sebagai Badan Hukum ~ 320
 - Negara sebagai subyek pelaku; organ negara ~ 321
 - Keterwakilan ~ 330
 - Negara sebagai subyek kewajiban dan hak ~ 334
 - c) Kewajiban Diri negara; Negara yang Diatur oleh Hukum (Rechtsstaat) ~ 345
 - d) Sentralisasi dan Desentralisasi ~ 346
 - e) Penghapusan Dualisme Hukum dan Negara ~ 351

VII. NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL ~ 353

- 42. ESENSI HUKUM INTERNASIONAL ~ 353
 - a) Sifat Legal Hukum Internasional ~ 353
 - b) Hukum Internasional merupakan Tatanan Hukum Primitif ~ 356
 - c) Hierarki Hukum Internasional ~ 357
 - d) Pewajiban dan Pewenangan tak langsung melalui Hukum Internasional ~ 358
- 43. HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL ~ 362
 - a) Kesatuan Hukum Internasional dan Nasional ~ 362
 - b) Tidak ada Konflik antara Hukum Internasional dan Nasional ~ 364
 - c) Hubungan Timbal-balik antara Dua Sistem Norma ~ 366
 - d) Konstruksi Monistik Merupakan Keniscayaan ~ 368

44. TEORI HUKUM DAN PANDANGAN DUNIA ~ 380

VIII. PENAFSIRAN ~ 384

45. SIFAT PENAFSIRAN ~ 384

- a) Ketidaktentuan Relatif dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 385
- b) Ketidaktentuan Tersengaja dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 386
- c) Ketidaktentuan Tak Sengaja dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 386
- d) Hukum yang Harus Diterapkan Merupakan sebuah Kerangka ~ 387
- e) Metode Penafsiran ~ 388

46. PENAFSIRAN SEBAGAI TINDAKAN PEMAHAMAN ATAU KEHENDAK ~ 390

47. PENAFSIRAN OLEH ILMU HUKUM ~ 392

CATATAN ~ 395

INDEX ~ 403